

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Seluruh proses pemerintahan yang dijalankan tidak terlepas dari campur tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kedaulatan rakyat menandakan adanya kebebasan berpolitik warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh proses politik. Kebebasan berpolitik didasarkan pada hak-hak sipil dan politik warga negara. Tantangan sebuah negara demokrasi adalah melemahnya partisipasi politik warga negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah nepotisme. Nepotisme merupakan tindakan merekrut atau memilih pejabat politik berdasarkan hubungan keluarga, etnis maupun agama dan bukan berdasarkan kualitas atau kompetensi yang dimiliki. Nepotisme yang terjadi tidak berkiblat pada kepentingan umum, tetapi sebaliknya pada kepentingan diri sendiri atau kelompok.

Berakarnya nepotisme dalam tubuh demokrasi bangsa Indonesia disebabkan oleh faktor penormalisasian masyarakat terhadap tindakan nepotisme. Fenomena nepotisme telah menjadi polemik yang terus diperbincangkan sepanjang rezim pemerintahan di Indonesia, bahkan sejak zaman pra kemerdekaan Indonesia. Nepotisme selalu dianggap sederhana dan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya nepotisme ibarat bom waktu yang nantinya akan menghancurkan dunia politik Indonesia. Hal yang paling sering terjadi adalah masyarakat memandang nepotisme mungkin hanya sebagai sebuah proses perekrutan pejabat politik yang sedarah, seasal ataupun seagama, dengan anggapan bahwa orang-orang yang dipilih memang memiliki kompetensi dan kualifikasi. Pandangan lain adalah masyarakat membiarkan nepotisme terjadi begitu saja tanpa intervensi, asalkan orang-orang yang dipilih dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sangat menekankan partisipasi politik warga negara. Eksistensi nepotisme akan meniadakan

pemerataan kedudukan pejabat politik dari seluruh agama dan etnis di Indonesia seturut semboyan keberagaman “Bhineka Tunggal Ika”.

Nepotisme itu sendiri terdiri atas dua perspektif yaitu perspektif bentuk hubungan dan perspektif etis. Dilihat dari perspektif bentuk hubungannya, nepotisme terdiri atas kekerabatan (*kishipism*), kekeluargaan (*familism*), dan klanisme/suku (*clannism*), patriotisme, rasisme, seksisme (perbedaan gender), dan planetisme (keberadaan/tempat tinggal). Nepotisme dari perspektif etis terdiri atas favoritisme (*discrimination in favor*), diskriminasi (*discrimination against*) dan partialitas (*partiality*). Sebagai sebuah kejahatan politik, nepotisme memiliki dampak negatif yang berkaitan langsung dengan dimensi keadilan sosial, yang wajib dipenuhi oleh negara bagi masyarakat. Perekrutan pejabat politik secara nepotis dapat mempersempit kesempatan kerja dan meningkatkan kesenjangan ekonomi. Perilaku nepotisme dapat menghambat kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Nepotisme menjadi pintu lahirnya kejahatan politik lain seperti korupsi, kolusi dan diskriminasi. Oleh sebab itu, tindakan nepotisme diatur secara khusus oleh undang-undang di Indonesia, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya bagi banyak orang.

Selain faktor penormalisasian masyarakat, ada pula faktor lain yang memengaruhi timbulnya nepotisme yakni faktor partisipasi politik masyarakat. Pada dasarnya nepotisme memiliki korelasi timbal balik dengan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik dapat menjadi sebab sekaligus akibat nepotisme. Partisipasi politik sebagai sebab nepotisme terlihat dari partisipasi politik yang rendah di kalangan masyarakat dan adanya anggapan terhadap nepotisme sebagai hal yang tidak berbahaya. Situasi demikian adalah tanda rendahnya pendidikan dan literasi politik masyarakat. Masyarakat yang pasif terhadap politik akan membuka lahan subur bagi oknum-oknum pejabat politik untuk melakukan nepotisme. Meluasnya praktik nepotisme dalam jaringan keluarga, agama dan etnis mengakibatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Pada titik inilah terlihat jelas bahwa partisipasi politik merupakan akibat dari nepotisme. Nepotisme yang mengakar akan membentuk pandangan publik terhadap kecilnya kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik serta

lemahnya keadilan sosial yang akan dijamin oleh negara. Publik menganggap bahwa jika seluruh struktur dan proses politik hanya akan dikuasai oleh kelompok atau dinasti tertentu, maka tidak bergunalah kehadiran mereka dalam politik. Lemahnya partisipasi politik oleh nepotisme berarti melemahkan daya saing politik masyarakat. Rendahnya partisipasi politik menunjukkan rendahnya minat masyarakat untuk terjun dalam dunia politik. Rendahnya partisipasi politik muncul dari pandangan hidup yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dipengaruhi oleh janji dan kekuasaan para elit. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan ekonomi masyarakat, sehingga mereka cenderung patuh kepada elit politik, meskipun terlibat dalam praktik nepotisme.

Sejak dahulu, Gereja telah menekankan pentingnya partisipasi di dalam politik bertolak dari tugas kerasulannya yakni menjadi saksi di tengah kehidupan dunia. Gereja harus terlibat dalam kompleksitas hidup dunia dengan mengamalkan nilai kebenaran Injil kepada segala makhluk. Dari seruan-seruan politis dalam alkitab, ajaran para teolog Gereja dan catatan dokumen-dokumen konsili, ditunjukkan perhatian Gereja yang intens terhadap masalah-masalah politik. Salah satu dokumen Gereja yang membahas pentingnya partisipasi politik adalah “Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik”. Dokumen ini memuat tanggapan yang tepat dari Gereja terkait persoalan-persoalan politik. Dokumen ini bertujuan untuk mengingatkan kembali prinsip-prinsip yang sejalan dengan suara hati Kristiani, yang menjadi landasan bagi keterlibatan sosial dan politik umat Katolik dalam masyarakat demokratis, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan politik. Gereja tidak bermaksud menangani pemecahan masalah politik secara khusus. Namun, Gereja memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan penilaian moral terkait persoalan-persoalan duniawi berhadapan dengan tuntutan iman dan hukum moral.

Sebagai orang beriman, orang-orang Kristen harus menghidupi politik berdasarkan tuntunan iman akan Yesus Kristus. Gereja mengarahkan umatnya agar menjauhi politik utopia dan sekularisme yang buta, atau dengan kata lain menjauhi politik yang hanya berdasar pada kesenangan duniawi. Politik yang demikian cenderung mengabaikan kepentingan umum dan menyimpang dari ideologi bangsa. Nepotisme merupakan

bentuk kesenangan duniawi yang kerap mengabaikan kepentingan umum. Nepotisme adalah penyebab rendahnya partisipasi politik. Konsep partisipasi politik berkaitan erat dengan konsep kebebasan. Konsep kebebasan yang ditawarkan oleh Gereja adalah konsep kebebasan yang berlandaskan kebenaran. Kebebasan otentik tidak dapat berdiri tanpa kebenaran. Kebebasan dan kebenaran harus berjalan berdampingan demi menghalau kejahatan. Nepotisme menjadi kejahatan politik yang harus diberantas. Pelemahan partisipasi politik masyarakat berarti perampasan hak dan kebebasan yang berakar pada martabat luhur manusia. Martabat manusia sebagai pendorong untuk berpartisipasi secara bebas dalam politik, tidak seharusnya dikekang oleh batasan-batasan eksternal, termasuk praktik nepotisme.

Dalam rangka pemberantasan nepotisme dan peningkatan partisipasi politik, Gereja menegaskan pentingnya kebebasan suara hati sebagai nilai yang perlu diwujudkan dalam kehidupan politik. Kebebasan suara hati berarti merekrut dan memilih pejabat harus berdasar pada tuntunan suara hati. Kebebasan suara hati akan menggerakkan orang katolik untuk berpartisipasi aktif dalam politik, sebagai jawaban atas panggilan kerasulan Gereja di dunia, sekalipun di tengah gonjang-ganjing bahaya nepotisme. Umat Kristiani dihimbau untuk setia menunaikan tugas-kewajibannya di dunia dengan dijiwai oleh semangat Injil. Partisipasi aktif dalam politik yang didorong oleh tuntunan iman akan menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi seorang Kristiani. Oleh karena itu, umat Kristiani perlu menjadikan ajaran dan nilai-nilai iman sebagai pedoman dalam aktivitas politiknya, sehingga tercipta keselerasan yang mengarah kepada kemuliaan Allah dan keselamatan manusia.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan partisipasi politik di tengah maraknya kejahatan nepotisme, umat Katolik perlu menyadari bahaya nepotisme bagi demokrasi dan cara menghadapinya. Berakarnya nepotisme dalam politik disebabkan karena faktor pembiaran dan penormalisasian nepotisme, serta adanya faktor kekuasaan yang memayungi tindakan nepotisme. oleh sebab itu, diperlukan adanya keberanian untuk menentang nepotisme dan kekuasaan di baliknya. Umat Katolik terlebih dahulu perlu

menyadari prinsip demokrasi, bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga seorang warga negara tidak boleh tunduk di bawah kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan harus berani menentang nepotisme dengan cara yang benar.

Berpolitik merupakan kegiatan yang melibatkan kepentingan banyak orang. Maka dari itu, partisipasi aktif dalam politik adalah sebuah tindakan kemanusiaan karena bertujuan mensejahterakan kehidupan banyak orang. Hal ini berarti partisipasi aktif dalam politik adalah tindakan menjawab tugas perutusan Yesus, amanat konsili tentang kerasulan awam dan seruan dokumen “Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik” yang membahas khusus soal-soal politik. Namun, tidak bisa dipungkiri umat Katolik memiliki wawasan politik yang rendah karena kurangnya edukasi politik. Sejak dahulu, Gereja telah menyediakan bermacam-macam sarana pendidikan politik yang tidak saja didapatkan di sekolah-sekolah khusus, melainkan dalam kegiatan-kegiatan kerasulan awam seperti katekese, rekoleksi, homili, renungan harian, pendidikan-pendidikan politik di sekolah-sekolah Katolik dan masih banyak lagi. Sudah sepatutnya melalui sarana-sarana ini, umat Katolik perlu mengikuti pendidikan politik. Di samping itu, peran orang tua, guru, rohaniwan dan rohaniwati singkatnya para pejabat Gereja perlu mendorong umatnya untuk terlibat dalam pendidikan politik. Para pimpinan Gereja sebagai gembala yang baik perlu mengarahkan umatnya untuk kritis dalam menilai kebijakan pemerintah dan memilih pemimpin seturut tuntunan suara hati. Para pemimpin Gereja harus mengambil sikap netral tanpa campur tangan politik, namun tetap berpihak pada kepentingan umum.